

**Nama Pejabat Wajib Laport LHKPN Polbangtan Yogyakarta Magelang
Tahun 2024**

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP | Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 2 | Hasan Azhari, SP | Pejabat Pembuat Komitmen, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 3 | Dr. RR Siti Astuti, SP., M.Sc | Pejabat Pembuat Komitmen, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 4 | Joko Suryono, SP | Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 5 | Syfa Pamulih Sukmaningrum, SP | Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 6 | Andriyanto, ST | Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 7 | Novi Perwitasari, A.Md | Bendahara Pengeluaran, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 8 | Ary Fitria Rohmawati, S.Pd.I | Bendahara Pengeluaran, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 9 | Ani Murhartati Savitri, SE | Bendahara Penerima, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 10 | Deni Febrianto, A.Md | Bendahara Penerima, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 11 | Acep Perdinan, S.Pt., M.Si | Pejabat Pembuat Komitmen, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
| 12 | Riesky Kurniawan Joko Praptono, A.Md | Pejabat Pembuat Komitmen, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG SUDARMANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **496924**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.260.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/160 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
2. Tanah Seluas 341 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/120 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **282.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5E AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **49.800.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **419.481.979**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Sub Total | Rp. | 2.011.281.979 |
| III. HUTANG | Rp. | 60.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.951.281.979 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASAN AZHARI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 257584

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.239.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 664.239.000

III. HUTANG Rp. 135.371.161

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 528.867.839

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN RORO SITI ASTUTI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 723071

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.375.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 375.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.000.000

1. MOTOR, HONDA MH Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.103.375.000

III. HUTANG Rp. 690.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 413.375.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO SURYONO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **143803**

II. DATA HARTA

| | | |
|--|------------|--------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 565.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 8.000.000 |
| 1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000 | | |
| 2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 29.750.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 13.500.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 616.250.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 83.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 533.250.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : ANDRIYANTO,ST
- Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
- NHK : 879502

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 275.000.000

- Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.500.000

- MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 299.200.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 299.200.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : NOVI PERWITASARI
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
- NHK : 721305

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 9.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI | Rp. | 9.000.000 |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 100.042.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 5.575.000 |
| Sub Total | Rp. | 114.617.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 84.100.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 30.517.000 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANI MURHARTATI SAVITRI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 185655

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/310 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 720.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 195.100.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 16.100.000
3. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO/MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.939.627

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 948.539.627

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 948.539.627

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.